

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani, Tjun Suryaman, *Sosiologi kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bagja Waluya, *Sosiologi menyelami fenomena sosial dimasyarakat, Setia purnama*, Bandung, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai Pustaka: Jakarta, 2005.

- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Olib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta, 2010.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, , *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo. 2001.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru) 1983*.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2008.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, 2016.

- Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1987.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007.
- Tim LBB SSC Internasional. *Teori Ringkas Sosiologi*. Yogyakarta: Intersolusi Pressindo, 2008.
- Tri Andriasman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar, Rangkang Education & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta, 2012.
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.
- Eka Saputra, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4, 2013.

Hanafi Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1. Nomor 2, 2018, hlm. 349-350.
<<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/54>>

Hendriawan, *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR*, *Jurnal Hukum*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Matulesy Samsul, "Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self Esteem Dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi, Volume IV Nomor 1, Januari, 2013.

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Recidive* Vol.7, No. 2, 2018.

Priyantoko, G. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt.

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1264/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt.

Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 30/Pid.B/2021/PN Liw.

Putusan PT MEDAN Nomor 464/Pid/2021/PT MDN.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

WEBSITE/INTERNET/DLL

<http://www.pengantarhukum.com>

<https://nasional.tempo.co/read/1461830/23-tahun-reformasi-rangkaian-peristiwa-mei-1998-berujung-soeharto-lengser>

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/060000765/kerusuhan-13-15-mei-1998--penyebab-kronologi-dan-dampaknya?page=1-2>